

Evaluasi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam Peningkatan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara

Kiring Yopi¹, Muhlis Hafel², Darmanto³

Universitas Terbuka

kiringyopi91@gmail.com, muhlis@ecampus.ut.ac.id, darmanto@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and identify community empowerment programs in improving appropriate technology at the Malinau Regency Community and Village Empowerment Office using the CIPP (Context, Input, Process, and Product) method. The method used uses a qualitative method with a survey design and in-depth interviews. Data was collected through interviews with resource persons of the head of the office, secretary, head of the field, staff of the empowerment office and the community. The results of data analysis show that the CIPP evaluation of the community empowerment program through appropriate technology in Malinau Regency shows effectiveness in increasing community independence and productivity despite various challenges. The input evaluation indicates the need for transparent management of funds and resources, active participation, and the use of technology that is appropriate to local conditions. In terms of process, program implementation adhered to SOPs, increased community safety and satisfaction, and training was effective in enhancing skills. The product evaluation showed that the program succeeded in increasing the capacity and independence of the institution and had a positive impact on community welfare. Challenges include limited access to technology, resources, and lack of training and collaboration, but enabling factors such as government support, planning, and distribution of tools remain key strengths in implementation.

Keywords: Evaluation, Appropriate Technology, CIPP, Empowerment

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis dan mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan teknologi tepat guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau menggunakan metode CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*). Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan desain survei dan wawancara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, staf dinas pemberdayaan dan masyarakat. Hasil analisis data menunjukkan bahwa evaluasi CIPP pada program pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kemandirian dan produktivitas masyarakat meskipun terdapat berbagai tantangan. Evaluasi *input* mengindikasikan perlunya pengelolaan dana dan sumber daya yang transparan, partisipasi aktif, serta penggunaan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal. Dari sisi proses, pelaksanaan program mematuhi SOP, meningkatkan rasa aman, dan kepuasan masyarakat, dengan pelatihan yang efektif dalam menambah keterampilan. Evaluasi produk memperlihatkan bahwa program berhasil meningkatkan kapasitas dan kemandirian lembaga serta membawa dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan akses teknologi, sumber daya, serta kurangnya pelatihan dan kolaborasi, namun faktor pendukung seperti dukungan

pemerintah, perencanaan, dan distribusi sarana tetap menjadi kekuatan utama dalam implementasi program.

Kata Kunci: Evaluasi, Teknologi Tepat Guna, CIPP, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang dilaksanakan melalui asas desentralisasi menuntut peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga diharapkan masing-masing daerah dapat meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan ekonomi rakyat serta dapat memacu pengembangan daerah melalui pengembangan komoditi unggulan daerah dengan memanfaatkan potensi daerah tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah masih dihadapkan dengan permasalahan pemberdayaan masyarakat desa yang begitu kompleks. Program pemberdayaan banyak diarahkan kepada masyarakat desa atas pertimbangan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya untuk memajukan desa pun belum sepenuhnya representatif. Ketertinggalan di bidang pembangunan masih sangat dirasakan dan banyaknya permasalahan yang belum dapat diatasi seperti rendahnya pendidikan, kesehatan, pendapatan dan fasilitas infrastruktur yang ada belum dapat mengubah secara signifikan menurunkan angka kemiskinan sehingga diperlukan adanya peningkatan pembangunan dan kemandirian masyarakat supaya lebih produktif dan efisien.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi. Agenda Riset Nasional (ARN) 2010-2014 mengemukakan bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan kemampuan penguasaan teknologi itu perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi merupakan salah satu pilihan yang tepat. Teknologi modern dianggap kurang tepat jika dikembangkan di negara berkembang salah satunya Indonesia untuk itu diperlukan pengenalan teknologi yang telah dikembangkan secara tradisional atau yang dikenal dengan "Teknologi Tepat Guna" atau teknologi sederhana dan proses pengenalannya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dan mata pencaharian pokok masyarakat tertentu.

Kebijakan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam bentuk regulasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. Teknologi Tepat Guna (TTG) dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan sasaran yang ada dengan mengacu pada peraturan terbaru Peraturan Menteri dan

Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 dan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017, Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Tujuan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan "Teknologi Tepat Guna", adalah (a) mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif "masyarakat", memperluas lapangan kerja, lapangan usaha, meningkatkan produktivitas dan mutu produksi, (b) menunjang pengembangan wilayah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab menuju keunggulan kompetitif dalam persaingan lokal, regional dan global, (c) mendorong tumbuhnya inovasi di bidang teknologi (Nekky et.al, Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen, 2015: 50).

Permasalahan sejauh ini masyarakat masih awam dengan Teknologi Tepat Guna. Tidak semua masyarakat mengetahui Teknologi Tepat Guna karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada perangkat desa dan perangkat desa kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pengimplementasian program. Respons informasi tergantung dari masing-masing individu. Masyarakat di desa memiliki beragam latar belakang pendidikan, status dan pekerjaan. Sosialisasi yang tidak tepat menghambat pengimplementasian program pemberdayaan masyarakat. Instansi terkait juga belum menyediakan informasi melalui *website* maupun pos-pos pelayanan yang menangani Teknologi Tepat Guna (Posyantek).

Permasalahan selanjutnya belum adanya Peraturan Desa yang mengatur Program Pemberdayaan Masyarakat khususnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Sejauh ini Peraturan Desa hanya mengatur anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat. Peraturan desa seharusnya bukan hanya mengatur anggaran dana desa terhadap program pemberdayaan masyarakat melainkan juga bagaimana program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Peraturan Desa mengenai program pemberdayaan masyarakat ini menunjukkan keseriusan dari pemerintah desa dalam membina masyarakat desa guna kesejahteraan masyarakat.

Itu tergantung pada keberadaan program yang merupakan tindakan atau tindakan yang dimaksudkan untuk mengeksekusi strategi dan dilakukan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pengaturan bersifat umum dan untuk mengetahui strategi, berbagai jenis proyek telah siap. Semua proyek harus dinilai untuk memutuskan apakah administrasi atau syafaat mereka telah mencapai target yang dinyatakan. Penilaian program adalah teknik yang disengaja untuk mengumpulkan, membedah, dan memanfaatkan data untuk menjawab pernyataan penting tentang program. Penilaian program dapat dikelompokkan menjadi penilaian proses, penilaian manfaat (penilaian hasil) dan penilaian efek (penilaian umpan). Evaluasi proses meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan; dan apakah target populasi yang

direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai strategi pelaksanaan program. Evaluasi bermanfaat untuk meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan (Wirawan, 2007).

Model CIPP dipilih untuk penelitian ini karena dikenal luas di seluruh dunia karena keandalan dan kepraktisannya (Esgaiar & Foster, 2019). Dari beberapa evaluasi model CIPP adalah evaluasi yang paling banyak diadopsi untuk program, institusi, dan kurikulum yang digunakan secara luas dan terkenal karena kemanjurannya, komprehensibilitas, dan reliabilitasnya, yang diadaptasi dalam penelitian saat ini. Beberapa hal yang dievaluasi dalam kurikulum adalah Konten, *input*, Pelaksanaan dan produk pembelajaran. Untuk mengevaluasi kurikulum tersebut, menggunakan model evaluasi CIPP (*Contexts, Input, Process, Product*). Model evaluasi CIPP merupakan model evaluasi yang lebih lengkap karena mencakup evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi konteks, *input*, proses, dan produk dapat dipraktikkan dalam rangka pengambilan keputusan (peran formatif) dan penyajian informasi mengenai akuntabilitas (peran sumatif). Konteks untuk mengumpulkan dan menganalisis *needs assessment* data untuk menentukan tujuan, prioritas dan sasaran. *Input* untuk mendapatkan sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai identifikasi program eksternal dan material dalam pengumpulan informasi terdapat pada dimensi. Proses untuk penyediaan pengambilan keputusan informasi tentang seberapa baik program diterapkan. Dengan terus menerus *me-monitoring* program, pengambilan keputusan mempelajari seberapa baik pelaksanaan telah sesuai petunjuk dan rencana, konflik timbul, dukungan staf dan moral, kekuatan dan kelemahan material, dan permasalahan penganggaran. Produk untuk mengukur *outcome* dan membandingkannya pada hasil yang diharapkan, pengambilan keputusan menjadi lebih mampu memutuskan jika program harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali (Syahrir et al., 2021).

Terdapat program TTG pada masyarakat Malinau yang telah berjalan pelaksanaannya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, namun masih ada yang dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini ditemukan di beberapa bidang seperti, pertanian, peternakan, perikanan, serta kerajinan tangan. Dalam bidang-bidang tersebut terdapat masalah umum yang dialami, yaitu TTG yang telah disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat belum bisa diadopsi secara maksimal oleh masyarakat (Syarif, 2022). Masalah ini timbul karena terdapat faktor penghambat yang ditemukan seperti kurangnya kreativitas dan inisiatif masyarakat dalam memanfaatkan teknologi.

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahannya pada perihal kegiatan evaluasi program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam menganut suatu program untuk tercapainya ketersediaan inovasi teknologi tepat guna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif Menurut Arikunto (2010:234) adalah

suatu penelitian untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Evaluasi Program Teknologi Tepat Guna dalam Peningkatan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Malinau

Implementasi kebijakan mengacu pada Tangkilisan (2003) yang menerangkan jika implementasi mengacu pada kegiatan yang bertujuan agar mencapai program, yang mana jabatan eksekutif mengatur bagaimana mempersiapkan, melaksanakan dan melaksanakan kebijakan yang dipilih. Agar Direktur Eksekutif mampu mengelola sumber daya, unit dan teknologi melalui lembaga yang dapat mendukung pelaksanaan program secara matang serta menjelaskan rencana yang ditetapkan dan arah yang ingin dicapai dapat dengan mudah diikuti program.

A. Evaluasi Context

Evaluasi konteks bertujuan untuk memahami latar belakang dan lingkungan di mana program atau kebijakan dilaksanakan. Ini mencakup analisis tujuan program, kebutuhan masyarakat, serta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan program. Evaluasi konteks membantu dalam menentukan relevansi dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi konteks membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di masyarakat sebelum merancang intervensi (Stufflebeam, 2003).

Menurut instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna, dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mempercepat kemajuan desa dan menghadapi persaingan global dipandang perlu melakukan percepatan pembangunan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang yang didukung oleh penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna. Berdasarkan hasil wawancara, dengan pertanyaan mengenai masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat yang dapat diatasi dengan penerapan teknologi tepat guna dalam program pemberdayaan masyarakat Kabupaten Malinau. Hal berikut diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wilayah Malinau:

Dalam pandangan saya sebagai kepala dinas, beberapa masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat yang dapat diatasi dengan penerapan teknologi tepat guna dalam program pemberdayaan masyarakat mencakup:

- Dalam program tepat guna yang ada akhirnya masyarakat tidak awam lagi dengan teknologi tepat guna yang ada.
- Penerapan teknologi tepat guna dapat membantu meningkatkan efisiensi usaha, memperluas akses pasar, dan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menyediakan alat dan teknologi yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka.

- Program pemberdayaan yang mengintegrasikan pelatihan teknologi tepat guna dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.
- Ada kalanya teknologi yang diterapkan tidak sesuai dengan kondisi lokal, yang dapat menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis kebutuhan dan kondisi masyarakat sebelum penerapan teknologi, agar solusi yang diberikan benar-benar tepat guna dan berkelanjutan.
- Dengan teknologi tepat guna, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung inovasi dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik”

Pendapat lain disampaikan oleh Kepala Bidang SDA dan TTG serta Bagian Keuangan dengan menyatakan bahwa:

“Banyak masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa teknologi tepat guna, seperti teknologi pertanian modern, dapat membantu meningkatkan hasil panen dan produktivitas. Masyarakat sering kali bergantung pada bantuan dari luar, baik dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Dengan teknologi tepat guna, masyarakat dapat mengembangkan solusi sendiri yang lebih sesuai dengan kondisi lokal mereka”.

Pendapat mengenai pemberdayaan masyarakat menurut Robert Chambers yang dikutip oleh Hendrawati Hamid merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan) dan *sustainable* (berkelanjutan). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya akhir-akhir ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap konsep pertumbuhan pada masa yang lalu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna Kabupaten Malinau. Hal berikut diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wilayah Malinau:

“Saya melihat bahwa kebutuhan masyarakat yang mendorong perlu dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna sangatlah kompleks. Secara garis besar, dapat dilihat bahwa:

- *Dalam pengolahan lahan pertanian masyarakat masih menggunakan teknologi tradisional, sehingga dengan penerapan teknologi tepat guna dapat membantu masyarakat meningkatkan produktivitasnya, tenaga kerja dan waktu yang dibutuhkan bisa lebih diminimalkan.*
- *Teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi lokal yang ada, seperti kerajinan tangan, pariwisata, pertanian, dan peternakan”.*

Pernyataan dari Kepala dinas diperkuat oleh hasil wawancara dari sekretaris, kepala bidang dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

“Masyarakat perlu meningkatkan keterampilan teknologi untuk mengolah potensi lokal secara efektif. Program pemberdayaan yang menerapkan teknologi tepat guna akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pelatihan berbasis teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang pertanian, pengolahan data, dan pengelolaan usaha. Keterbatasan akses terhadap sumber daya menjadi tantangan, namun program yang mengintegrasikan teknologi dapat membantu masyarakat mengakses informasi, modal, dan pasar, serta menggunakan aplikasi untuk memasarkan produk lokal dan alat pertanian yang efisien”.

Menurut Robert Eyestone (dalam Winarno, 2012:20), kebijakan publik dapat diartikan “secara luas” sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang disajikan oleh Eyestone mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Thomas R. Dye 1967 dalam Awan (2016:18) kebijakan publik suatu pilihan yang mau dilakukan atau tidak oleh pemerintah untuk mengatur konflik atau kebijakan publik disebut serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan yang mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wilayah Malinau mengenai tujuan dan kebijakan program ini sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat menyatakan bahwa:

“Tujuan dan kebijakan program pemberdayaan masyarakat harusnya selaras dengan kebutuhan dan potensi masyarakat agar dapat memberikan dampak yang signifikan. Memang sering kali kami temukan beberapa kebijakan yang belum sesuai dengan kebutuhan Masyarakat yang akhirnya harus kami evaluasi sebagai bidang yang menentukan program Masyarakat itu. Selanjutnya tujuan dan kebijakan beberapa program ini sesuai dengan kebutuhan dan potensi Masyarakat karena kami melakukan analisis kebutuhan Masyarakat, melihat potensi yang dimiliki Masyarakat lokal, keterlibatan Masyarakat itu sendiri, fokus pada kebutuhan dasar Masyarakat serta evaluasi terhadap program itu sendiri.”

Pernyataan lain terkait tujuan kebijakan program disampaikan oleh sekretaris, Kepala Bidang SDA dan TTG serta Bagian Keuangan dan Staf untuk memperkuat hasil wawancara kepala dinas:

“Tujuan dan kebijakan program telah dievaluasi dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program dan memanfaatkan potensi lokal sangat penting untuk keberhasilan program. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk menjaga relevansi dengan perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Program pemberdayaan dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata dan potensi masyarakat, dengan fokus pada aspek ekonomi, infrastruktur, dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Analisis kebutuhan yang mendalam dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan program sangat penting. Keterlibatan masyarakat membuat mereka merasa memiliki dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Program yang sesuai dengan kebutuhan dan

potensi masyarakat, dengan analisis yang tepat dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan, dapat memberikan manfaat signifikan. Tantangan harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan program”.

Program pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten Malinau memiliki manfaat berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas yang menyampaikan bahwa:

“Program pemberdayaan masyarakat sering kali melibatkan pelatihan keterampilan, penerapan teknologi tepat guna, akses ke modal, dan pembentukan usaha kecil. Ini membantu individu dan kelompok dalam meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Dengan keterampilan baru dan akses ke sumber daya, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, mengembangkan usaha sendiri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan mereka. Selanjutnya, penerapan teknologi tepat guna akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program serta memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya saing. Sebagai staf pelaksana, kami memfasilitasi program pelatihan dan bimbingan usaha yang langsung berdampak pada perbaikan kondisi ekonomi lokal”.

Teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat diterapkan dengan mudah (Impres No. 3 Tahun 2001). Sumber daya yang tersedia harus memadai secara kuantitas dan kualitas untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna. Dalam hasil wawancara dengan kepala dinas beliau menyatakan bahwa:

“Dalam pandangan saya sebagai kepala dinas pemberdayaan Masyarakat, penilaian terhadap sumber daya yang tersedia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sangat penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna. Saya temukan bahwa sumber daya manusia sudah cukup untuk program pemberdayaan Masyarakat Namun, sering kali terdapat kekurangan dalam pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk mempersiapkan masyarakat dalam menggunakan teknologi baru. Kemudian secara sumber daya alam Misalnya, teknologi pertanian modern dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Namun, jika SDA terbatas atau tidak dikelola dengan baik, maka program pemberdayaan tidak akan berjalan dengan optimal. Selanjutnya Kebijakan pemerintah yang mendukung pemberdayaan masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya. Program-program yang terintegrasi dan melibatkan berbagai sektor dapat meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada. Misalnya, kolaborasi antara dinas terkait dalam pelaksanaan program dapat memperkuat dukungan dan sumber daya yang tersedia.”

Dalam pemahaman masyarakat tentang evaluasi *context* pada program pemberdayaan masyarakat yang menyatakan:

“Program pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau efektif dalam meningkatkan kemandirian dan produktivitas. Meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengetahuan dan sumber daya,

pelatihan dan dukungan berkelanjutan dapat membantu mengatasi hambatan ini dan memaksimalkan manfaat program”.

Dari pemaparan di atas mengenai evaluasi *context* program pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau menunjukkan program pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau efektif dalam meningkatkan kemandirian dan produktivitas. Meskipun tantangan tetap ada, pelatihan dan dukungan berkelanjutan dapat membantu mengatasi hambatan ini dan memaksimalkan manfaat program.

B. Evaluasi Input

Evaluasi masukan berfokus pada sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program. Ini mencakup analisis terhadap anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang diperlukan. Evaluasi masukan bertujuan untuk memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan program telah disiapkan dengan baik.

Pertanyaan dari kepala dinas mengenai sumber daya yang tersedia cukup secara kuantitas dan kualitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna diperkuat dari hasil wawancara dengan sekretaris yang menyatakan:

“Kami kaya akan sumber daya alam, seperti tanah subur untuk pertanian. Namun, akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai sering kali terbatas, sehingga potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kadang ketersediaan akses infrastruktur tidak cukup untuk pelaksanaan suatu program. Secara SDM sudah cukup karena kami mampu melihat Teknologi yang diterapkan harus sesuai dengan kondisi lokal dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kualitas partisipasi masyarakat dalam program juga berpengaruh. Jika masyarakat merasa memiliki program tersebut, mereka akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam pelaksanaannya”.

“Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Femmy, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas tentang alokasi dan pengelolaan dana/anggaran untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Untuk alokasi dan pengelolaan dana/anggaran program pemberdayaan sendiri membutuhkan:

- *Perencanaan yang matang seperti melakukan kajian mendalam terhadap kebutuhan masyarakat di setiap daerah untuk menentukan prioritas program.*
- *Transparansi yaitu masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legalitas maupun administratif*

- *Partisipasi aktif dari berbagai pihak seperti Lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.*
- *Program ini sendiri didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.*

Pertanyaan dari kepala dinas mengenai bagaimana alokasi dan pengelolaan dana/anggaran untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diperkuat dari hasil wawancara dengan sekretaris, kepala bidang dan staff yang menyatakan:

“Sumber Dana dan Pengelolaan: Dana program berasal dari anggaran pemerintah daerah yang harus dikelola dengan transparan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana penting untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Proses Perencanaan dan Alokasi Dana: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Dana dialokasikan berdasarkan prioritas program yang telah ditetapkan dan mencakup berbagai komponen seperti pelatihan, pengadaan, biaya operasional, serta monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan dan Pembagian Anggaran: Setelah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, proposal program disusun mencakup tujuan, kegiatan, dan anggaran yang diperlukan. Setelah disetujui, dana dibagi ke berbagai pos seperti pelatihan, peralatan, dan penyuluhan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik”

Dalam evaluasi *input* program pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna menunjukkan bahwa:

“Pemanfaatan sumber daya yang sebelumnya kurang optimal, seperti lahan kosong, kini digunakan secara efektif untuk perkebunan dan pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tinggi. Materi pelatihan yang diberikan mudah dipahami dan menarik, serta memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan teknologi yang diajarkan, mendukung pemahaman dan aplikasi yang efektif. Selain itu, sarana dan prasarana yang disediakan sangat mendukung program, mendorong partisipasi aktif masyarakat dan memastikan keterlibatan yang efektif dalam pembangunan”.

Secara keseluruhan evaluasi *input* pada implementasi program melalui teknologi tepat guna menunjukkan bahwa alokasi dan pengelolaan dana untuk program pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna menekankan bahwa sumber daya alam, seperti tanah subur, memadai namun akses ke teknologi dan infrastruktur sering terbatas, menghambat pemanfaatan penuh potensi tersebut. Sumber daya manusia dianggap cukup, dengan teknologi yang diterapkan harus sesuai dengan kondisi lokal dan mudah dipahami oleh masyarakat. Alokasi dana memerlukan perencanaan matang, transparansi, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, dengan dana berasal dari APBN dan APBD. Evaluasi menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya kini lebih optimal, materi pelatihan efektif dan menarik, serta sarana dan prasarana yang mendukung program berkontribusi pada partisipasi aktif masyarakat dan pelaksanaan yang efektif.

C. Evaluasi Process

Evaluasi proses menilai bagaimana program dilaksanakan. Ini melibatkan pemantauan kegiatan sehari-hari dan interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tujuan dari evaluasi proses adalah untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, sehingga jika ada masalah atau hambatan muncul selama pelaksanaan, dapat segera diidentifikasi dan diatasi. Proses evaluasi memberikan wawasan penting tentang bagaimana program dijalankan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya (Fitzpatrick et al., 2011).

Pendampingan dirasakan efektif karena relasi pendamping dengan masyarakat sangat dekat, durasi waktu pendampingan relatif lama, materi pelatihan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat di dalam pendampingan tinggi, materi dan target pemberdayaan lebih terencana. Dengan demikian, pendekatan pemberdayaan masyarakat desa yakni pendekatan pendampingan, akan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, peran masyarakat secara optimal dalam membangun kemandirian dan percepatan mencapai tujuan pengembangan desa (Wayan 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wilayah Malinau mengenai ketersediaan materi dan pendampingan pelatihan bagi pemberdayaan masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna menyatakan bahwa:

“Sebelum suatu program dilaksanakan maka dibutuhkan pendampingan. Secara teori kami menyediakan materi dan pendampingan bagi pemberdayaan masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna. Hal ini kami atur dalam rapat dan evaluasi di dinas pemberdayaan Masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna menyediakan kami mengatur materi dan pendampingan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi mereka”.

Pertanyaan dari kepala dinas ketersediaan materi dan pendampingan pelatihan bagi pemberdayaan masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna diperkuat oleh sekretaris dan kepala bidang yang menyatakan bahwa:

“Dalam program pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna, materi dan pendampingan pelatihan sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi. Kami menyediakan materi dan pendampingan pelatihan yang cukup memadai, dengan kualitas materi dan metode penyampaian yang baik, serta pendampingan praktis selama pelatihan. Hal ini berkontribusi pada keberhasilan program dan peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan adanya materi pelatihan dan pendampingan, masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, tetapi juga dukungan yang berkelanjutan untuk menerapkan teknologi tersebut secara efektif dan berkelanjutan”.

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan sebuah proses pemberian motivasi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengambil keputusan yang berlandaskan sumber daya pribadi, melalui sebuah partisipasi, demokratisasi,

pembelajaran dan pengalaman sosial serta memiliki tujuan berupa upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan (Mulyawan, 2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas tentang pelaksanaan program pemberdayaan dan metode pemberdayaan dalam penerapan teknologi tepat guna yang menunjukkan bahwa:

“Dalam pandangan saya sebagai kepala dinas pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan program pemberdayaan dan metode pemberdayaan melalui penerapan teknologi tepat guna sepertinya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus dimulai dengan perencanaan yang melibatkan masyarakat. Dalam pelaksanaan Program pemberdayaan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, dan pengembangan usaha mikro. Misalnya, dalam konteks teknologi tepat guna, program dapat mencakup pelatihan penggunaan alat pertanian modern, seperti hand tractor, yang dapat meningkatkan efisiensi pertanian Masyarakat. Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program. Ini bertujuan untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi juga sangat penting untuk mendapatkan umpan balik. Adapun metode bisa ditemukan bahwa kami melakukan pendekatan berbasis potensi apa yang dimiliki masyarakat lokal, Pendidikan dan pelatihan kami lakukan bagi masyarakat, kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, dapat memperkuat pelaksanaan program serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses informasi dan komunikasi di antara Masyarakat”.

Pernyataan kepala dinas tentang pelaksanaan dan metode pemberdayaan disampaikan juga pernyataan oleh sekretaris, kepala bidang dan staf yang menyatakan:

“Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malinau melalui penerapan teknologi tepat guna dilakukan secara terencana dan melibatkan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Metode yang digunakan meliputi pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan pelatihan, serta penggunaan teknologi tepat guna, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil meliputi:

- Mengadakan survei dan diskusi untuk memahami kebutuhan dan masalah masyarakat.*
- Memilih teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.*
- Mengembangkan materi pelatihan dengan panduan praktis, langkah implementasi, dan studi kasus.*
- Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.*
- Mengumpulkan umpan balik dari peserta untuk memahami dampak dan kebutuhan tambahan.*

Program ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada perencanaan yang melibatkan masyarakat, pendampingan berkelanjutan, dan relevansi metode pemberdayaan dengan kebutuhan lokal. Dengan pendekatan yang tepat, program ini dapat memberikan manfaat signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat pedalaman”.

Partisipasi dalam implementasinya (*Participation in implementation*) merupakan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Maknanya adalah pada suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang operasionalnya dilaksanakan oleh masyarakat yang telah ikut serta dan aktif serta sadar dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat didorong mampu menjalankan apa yang telah diputuskan bersama dengan penyelenggara program pemberdayaan masyarakat (Cohen, 1977). Hasil wawancara dengan kepala dinas tentang partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mengikuti program pemberdayaan masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, saya melihat bahwa tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mengikuti program pemberdayaan masyarakat sangatlah beragam :

- *Partisipasi aktif: Masyarakat terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.*
- *Partisipasi pasif: Masyarakat hanya menerima manfaat dari program tanpa terlibat secara aktif”.*

“Terkait partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat sekretaris, kepala bidang dan staf menyampaikan pernyataan bahwa:

Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malinau melalui teknologi tepat guna melibatkan partisipasi aktif dan pasif dari masyarakat. Sebagian masyarakat berpartisipasi aktif mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, sementara yang lain hanya menerima manfaatnya. Meskipun ada yang pasif, secara keseluruhan masyarakat cukup antusias dan aktif dalam mengikuti program ini.

Pelatihan dan pendampingan dalam program ini dinilai efektif karena:

- *Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas di kalangan peserta.*
- *Meningkatnya pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat.*
- *Perbaikan kondisi kesehatan dan akses terhadap layanan dasar.*
- *Tingginya tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat, dengan komunitas belajar yang aktif.*
- *Kemampuan masyarakat untuk mengadaptasi teknologi dan mengembangkan solusi inovatif sesuai kebutuhan lokal”.*

Dalam hal evaluasi proses program tepat guna masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan SOP, memuaskan masyarakat dengan memberikan rasa aman dan kepercayaan.

Masyarakat antusias berpartisipasi penuh dan menemukan pelatihan sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Namun, beberapa kendala seperti kurangnya keterampilan dan keterlambatan dalam menguasai teknologi tepat guna masih ada. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti pendidikan dan pelatihan, kampanye kesadaran, serta pemberian bantuan sosial.

Secara keseluruhan evaluasi proses pada implementasi program teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau menjelaskan Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau melibatkan perencanaan yang melibatkan masyarakat dan dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, dan pengembangan usaha mikro. Hal menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi berkala serta keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi. Metode yang digunakan mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, pelatihan, dan pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat bervariasi, dengan sebagian terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan, sementara yang lain hanya menerima manfaat. Pelatihan dianggap efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mendorong kemandirian ekonomi. Namun, beberapa kendala seperti kurangnya keterampilan dan keterlambatan dalam menguasai teknologi tetap ada, dengan pemerintah menangani masalah ini melalui pendidikan, pelatihan, kampanye kesadaran, dan bantuan sosial.

D. Evaluasi *Product*

Evaluasi produk mengukur hasil akhir dari program atau kebijakan. Ini mencakup penilaian terhadap dampak dan efektivitas program setelah dilaksanakan, serta keberlanjutan dari hasil yang dicapai. Evaluasi produk membantu dalam menentukan apakah tujuan awal program telah tercapai dan apakah ada dampak positif atau negatif yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi produk memberikan bukti tentang dampak kebijakan dan efektivitas intervensi (Scriven, 1991).

Tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. penerapan teknologi tepat guna dalam program pemberdayaan masyarakat telah meningkatkan kapasitas dan kemandirian lembaga kemasyarakatan (Sulistiyani, 2004). Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas, sekretaris, kepala dan staf menyatakan bahwa:

“Penerapan teknologi tepat guna dalam program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malinau telah meningkatkan kapasitas dan kemandirian lembaga kemasyarakatan. Hal ini terlihat dalam berbagai bidang di mana masyarakat menunjukkan peningkatan kemandirian melalui:

- *Peningkatan kapasitas ekonomi.*

- Pengembangan sumber daya manusia.
- Dukungan berkelanjutan.

Lembaga kemasyarakatan menjadi lebih mandiri dan efektif dalam menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Teknologi telah membuat program lebih cepat dan efektif, memungkinkan sumber daya dialokasikan untuk kegiatan lain yang bermanfaat. Misalnya, teknologi pertanian sederhana yang efektif dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan luar. Masyarakat mampu mengadaptasi dan mengembangkan teknologi sesuai kebutuhan dan kondisi lokal, menciptakan solusi yang relevan dan berkelanjutan. Program ini sering mencakup pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggota lembaga kemasyarakatan, seperti penggunaan alat pertanian modern atau teknologi informasi, yang membantu dalam mengelola sumber daya lebih efisien. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam keterbatasan sumber daya finansial dan manusia. Beberapa lembaga mungkin tidak memiliki cukup dana untuk mengadopsi teknologi baru secara maksimal. Untuk menjaga dan meningkatkan dampak positif program ini, tantangan tersebut perlu diatasi”.

Dalam pemahaman masyarakat dengan evaluasi *product* implementasi program teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa:

“Masyarakat merasakan dampak positif dari program pemberdayaan dengan penerapan teknologi tepat guna, merasa lebih mandiri, sejahtera, dan optimis tentang masa depan. Program ini sangat membantu mereka dalam memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif, meningkatkan kesejahteraan, keberlanjutan lingkungan, dan daya saing ekonomi. Masyarakat menilai program ini efektif dan berharap agar keberlanjutannya dapat memberikan manfaat yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian, serta menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan dengan dampak jangka panjang”.

Pada evaluasi *product* implementasi program teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau secara keseluruhan menunjukkan Penerapan teknologi tepat guna dalam program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malinau telah meningkatkan kapasitas dan kemandirian lembaga kemasyarakatan, termasuk dalam aspek ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan berkelanjutan. Masyarakat merasakan dampak positif, seperti peningkatan kesejahteraan dan kemandirian, serta kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif. Program ini dinilai efektif dan diharapkan dapat berlanjut untuk memberikan manfaat jangka panjang serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya finansial dan manusia perlu diatasi untuk memaksimalkan dampak positif program.

Faktor yang mendukung dan menghambat evaluasi program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam peningkatan teknologi tepat guna pada program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau

Evaluasi menurut Daniel L. Stufflebeam merupakan proses menggambarkan, memperoleh, melaporkan dan menerapkan informasi deskriptif dan penilaian

mengenai beberapa nilai objek, seperti contoh kualitas, nilai, kejujuran, kesetaraan, kelayakan, biaya, efisiensi, keamanan atau kepentingan lainnya (Stufflebeam and Zhang 2017).

Kajian evaluasi program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam peningkatan teknologi tepat guna pada program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau menggunakan teori Daniel L. Stufflebeam melalui evaluasi *context*, evaluasi *input*, evaluasi proses dan evaluasi *product*. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat evaluasi program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam peningkatan teknologi tepat guna pada program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Dalam konteks ini, evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) menjadi relevan sebagai kerangka kerja untuk menilai berbagai aspek dari program pemberdayaan. Melalui evaluasi ini, dapat diidentifikasi faktor-faktor pendukung yang berkontribusi pada keberhasilan program yang terdiri dari:

Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, merumuskan tujuan program dan menentukan atau mengidentifikasi kebutuhan yang akan dicapai oleh suatu program (Junanto and Kusna 2018). Dalam penelitian ini pada evaluasi program teknologi tepat guna. Evaluasi *context* bertujuan untuk mengetahui apakah program teknologi guna sudah sesuai. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam evaluasi konteks pada program teknologi guna di Kabupaten Malinau dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dengan staf menyatakan bahwa:

“Program pemberdayaan masyarakat perlu dimulai dengan analisis kebutuhan mendalam untuk efektivitas. Tanpa dasar kebutuhan nyata, program sering gagal. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penting untuk meningkatkan kepemilikan dan motivasi. Program yang tidak melibatkan masyarakat sering kali tidak memenuhi harapan mereka. Program harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat untuk hasil yang efektif. Dengan analisis kebutuhan yang tepat, keterlibatan masyarakat, dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan, manfaat signifikan dapat dicapai, meskipun tantangan perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan”.

Dari keseluruhan pemaparan dalam lingkup evaluasi konteks maka dalam implementasi program teknologi tepat guna ditemukan faktor pendukung terdiri dari analisis kebutuhan yang mendalam, keterlibatan masyarakat, penyesuaian program dengan kebutuhan, potensi masyarakat, dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan.

Evaluasi *input* dilakukan dengan menelaah dan menilai pendekatan yang relevan yang dapat digunakan (Matulandi and dkk 2017). Dalam penelitian ini, evaluasi masukan bertujuan untuk mengetahui kepatuhan

sumber daya manusia yaitu partisipasi masyarakat, pendampingan dan untuk mengetahui ketersediaan sumber daya, Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam evaluasi *input* pada program teknologi guna di Kabupaten Malinau dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dengan pemangku kepentingan dinas pemberdayaan masyarakat kabupaten Malinau menyatakan bahwa:

“Program pemberdayaan masyarakat perlu fokus pada pendistribusian sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dengan masyarakat menyatakan bahwa:

“Materi pendampingan yang mudah dipahami serta sarana prasarana penunjang pemberdayaan yang mendukung”

Dari keseluruhan pemaparan dalam lingkup evaluasi konteks maka dalam implementasi program teknologi tepat guna ditemukan faktor pendukung adalah perencanaan dan pendistribusian sarana yang memadai, kualitas sarana dan infrastruktur yang mendukung, serta adanya keterlibatan masyarakat.

Penilaian proses memberi tumpuan kepada pelaksanaan terhadap program, penilaian proses untuk memahami bagaimana program menjalankan fungsinya (Mustafa and Yakob 2021). Dalam penelitian ini, evaluasi proses meliputi kesesuaian program dan kendala dan hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan program teknologi tepat guna untuk pemberdayaan masyarakat Malinau.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dengan pemangku kepentingan dinas pemberdayaan masyarakat kabupaten Malinau menyatakan bahwa:

“Solusi yang diusulkan meliputi pelatihan dan peningkatan kapasitas, sosialisasi dan edukasi yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal, serta membangun kemitraan untuk mendapatkan dukungan sumber daya. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta membangun komunikasi yang baik, program dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian ekonomi masyarakat, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan mereka”.

Dari keseluruhan pemaparan dalam lingkup evaluasi proses maka dalam implementasi program teknologi tepat guna ditemukan faktor pendukung adalah adanya pelatihan dan pendampingan, kemampuan dalam kesesuaian teknologi, dukungan serta timbal balik dari masyarakat selanjutnya terdapat kemitraan dan dukungan eksternal.

Evaluasi produk melibatkan pengukuran hasil yang diharapkan melalui program (Mustafa and Yakob 2021). Serta bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai capaian program (Muyana 2017). Dalam

penelitian ini, evaluasi produk berupa hambatan dan pendukung dalam program ke depannya;

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dengan pemangku kepentingan dinas pemberdayaan masyarakat kabupaten Malinau menyatakan bahwa:

“Program pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna memiliki faktor pendukung seperti peningkatan kualitas hidup melalui pelatihan dan pendidikan, partisipasi aktif masyarakat, peraturan dan dukungan pemerintah dalam RPJMD 2021-2026 Malinau, pendidikan berkelanjutan, evaluasi program, dan penggunaan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal.”

Dari keseluruhan pemaparan dalam lingkup evaluasi *product* maka dalam implementasi program teknologi tepat guna ditemukan faktor pendukung adanya peningkatan kualitas hidup, keterlibatan masyarakat yang aktif, peraturan dan dukungan pemerintah serta keberlanjutan program. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini, evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi tepat guna demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malinau.

b. Faktor Penghambat

Evaluasi program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam peningkatan teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas dan keberhasilannya. Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung yang dapat memperkuat pelaksanaan program, faktor penghambat sering kali menjadi kendala signifikan yang perlu diidentifikasi dan diatasi. Dalam konteks ini, model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) menawarkan pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang dapat memengaruhi pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dengan masyarakat menyatakan bahwa:

“Situasi lingkungan masyarakat kami menghadapi berbagai tantangan, dan masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Kami berharap ada perhatian dan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk membantu mengatasi masalah-masalah ini dan meningkatkan kualitas hidup kami”.

Ditemukan juga faktor penghambat yaitu kurangnya analisis kebutuhan yang mendalam, keterlibatan masyarakat yang tidak memadai, tantangan lingkungan dan kebutuhan yang belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dengan pemangku kepentingan dinas pemberdayaan masyarakat kabupaten Malinau menyatakan bahwa:

Namun, tantangan seperti kurangnya akses teknologi dan infrastruktur, kekurangan tenaga kerja terlatih, serta keterbatasan sumber

daya dapat menghambat efektivitas program. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memastikan perencanaan yang baik, memanfaatkan sumber daya dengan optimal, dan melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga program dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan”.

Dalam hal faktor penghambat terdiri dari kurangnya akses teknologi dan infrastruktur, kekurangan tenaga kerja terlatih, keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dengan pemangku kepentingan dinas pemberdayaan masyarakat kabupaten Malinau menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan keterampilan dan pengetahuan, rendahnya kesadaran, serta koordinasi yang kurang efektif. Masyarakat sering kali acuh tak acuh atau lebih memilih aktivitas yang langsung menghasilkan pendapatan. Infrastruktur yang tidak memadai dan resistensi budaya juga menjadi penghalang.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dengan masyarakat menyatakan bahwa:

“Mungkin kendalanya itu saya masih kurang terampil dan sedikit terlambat untuk menguasai teknologi tepat guna pada program yang disediakan”

Kemudian penghambat adalah kurangnya pelatihan, kurangnya pemanfaatan dan kolaborasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara mengenai dengan masyarakat menyatakan bahwa:

“Masyarakat menilai bahwa program pemberdayaan ini efektif dan berharap agar keberlanjutannya dapat memberikan manfaat lebih besar di masa depan, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian kami. Masyarakat berharap agar program ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan di daerah kami. Kami ingin melihat dampak jangka panjang dari pemberdayaan yang telah dilakukan.”

Adapun faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, masalah keberlanjutan program serta evaluasi peraturan yang kurang efektif.

Dengan memahami faktor-faktor penghambat ini, evaluasi dapat dilakukan dengan lebih mendalam untuk merumuskan strategi perbaikan. Analisis terhadap hambatan-hambatan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan masyarakat dan memastikan bahwa teknologi tepat guna dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai faktor penghambat evaluasi program ini menjadi krusial untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari inisiatif pemberdayaan di Kabupaten Malinau.

Pembahasan

Context Evaluation

Evaluasi konteks berfokus pada analisis kebutuhan (*needs assessment*), yaitu mengevaluasi tujuan dan prioritas dalam kaitannya dengan kebutuhan serta peluang yang tersedia dari program yang akan diterapkan (Artanto, et al., 2021)

Evaluasi program pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan kemandirian dan produktivitas. Walaupun ada tantangan, pelatihan dan dukungan berkelanjutan dapat membantu mengatasi hambatan dan memaksimalkan manfaat program. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati, et al., (2022) yang menunjukkan bahwa dengan penerapan program dapat meningkatkan kemandirian masyarakat karena mereka lebih produktif. Selain itu, kebutuhan masyarakat desa nantinya akan dipenuhi melalui program pemberdayaan.

Input Evaluation

Evaluasi *input* menilai apakah kualitas dan kuantitas sumber daya di masyarakat desa cukup untuk merencanakan dan melaksanakan program. Menurut Holden dan Zimmerman (2009), harus ada keseimbangan antara apa yang dievaluasi dan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut mencakup manusia, alam, dana, prosedur, serta sarana dan prasarana. Ketidakeimbangan dapat menghambat pelaksanaan program dan berdampak negatif pada pembangunan desa.

Evaluasi *input* pada program teknologi tepat guna menunjukkan bahwa alokasi dan pengelolaan dana untuk pemberdayaan masyarakat perlu perhatian pada sumber daya alam yang memadai namun sering terhambat oleh akses terbatas ke teknologi dan infrastruktur. Sumber daya manusia cukup, tetapi teknologi harus sesuai dengan kondisi lokal. Alokasi dana memerlukan perencanaan yang matang, transparansi, dan partisipasi aktif, dengan dana dari APBN dan APBD. Evaluasi mengungkapkan bahwa pemanfaatan sumber daya sudah lebih optimal, pelatihan efektif dan menarik, serta sarana dan prasarana mendukung partisipasi aktif masyarakat. Pendampingan dianggap efektif karena kedekatan relasi, durasi yang lama, materi yang relevan, dan partisipasi tinggi. Pendekatan ini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan pengembangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratiwi, et al., (2016), yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan program harus didukung dengan fasilitas yang dimiliki, ketersediaan secara kuantitas sumber daya manusia, dan perencanaan dana yang matang dalam pelaksanaan program.

Evaluasi Proses

Evaluasi Proses adalah cara program diimplementasikan, termasuk strategi yang digunakan, aktivitas yang dilakukan, dan interaksi antara personel dan peserta program. Evaluasi proses bertujuan untuk mengevaluasi apakah strategi dan aktivitas yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan program dan apakah interaksi antara personel dan peserta program positif (Bachtiar, 2021).

Evaluasi proses pada program pemberdayaan masyarakat dengan teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa pelaksanaan program sesuai

dengan SOP, memuaskan masyarakat, dan meningkatkan rasa aman serta kepercayaan. Masyarakat antusias berpartisipasi dan menemukan pelatihan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Namun, masih ada kendala seperti kurangnya keterampilan dan keterlambatan menguasai teknologi. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti pendidikan dan pelatihan, kampanye kesadaran, serta pemberian bantuan sosial. Pelaksanaan program melibatkan perencanaan dan pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, dan pengembangan usaha mikro, serta menekankan pentingnya pemantauan berkala dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat bervariasi, namun pelatihan dianggap efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Yoga, 2022) yang menunjukkan masyarakat lokal juga memiliki pengolahan pemberdayaan SDA yang baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Evaluasi Produk

Julianto & Fitriah (2021) menyatakan bahwa evaluasi *product* adalah hasil yang dicapai oleh program, seperti peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta program. Evaluasi produk bertujuan untuk mengevaluasi apakah program mencapai tujuan yang ditetapkan dan apakah hasil yang dicapai sesuai dengan harapan. Untuk membantu dalam pengambilan keputusan selanjutnya dalam menginterpretasikan dan mengukur hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Informasi tentang kegiatan ini menentukan apakah program dapat dilanjutkan, diubah atau bahkan dihentikan.

Evaluasi *product* pada program pemberdayaan masyarakat dengan teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa pada evaluasi *product* evaluasi *product* implementasi program teknologi tepat guna secara keseluruhan menunjukkan penerapan teknologi tepat guna dalam program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malinau telah meningkatkan kapasitas dan kemandirian lembaga kemasyarakatan, termasuk dalam aspek ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan berkelanjutan. Masyarakat merasakan dampak positif, seperti peningkatan kesejahteraan dan kemandirian, serta kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif. Program ini dinilai efektif dan diharapkan dapat berlanjut untuk memberikan manfaat jangka panjang serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya finansial dan manusia perlu diatasi untuk memaksimalkan dampak positif program. Hasil pembahasan pada penelitian ini sejalan dengan Tricahyono, (2008) dengan potensi masyarakat dapat diaktualisasi melalui upaya pemberdayaan sehingga tercipta suatu masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan merupakan suatu bentuk kualitas hidup yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keseimbangan hidup itu dibangun oleh anggota masyarakat. Di Kabupaten Malinau Masyarakat merasakan dampak positif, seperti peningkatan kesejahteraan dan kemandirian, serta kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif.

KESIMPULAN

1. Evaluasi program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam peningkatan teknologi tepat guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau sebagai berikut:
 - a. Evaluasi *Context*

Evaluasi konteks pada program pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan kemandirian dan produktivitas. Walaupun ada tantangan, pelatihan dan dukungan berkelanjutan dapat membantu mengatasi hambatan dan memaksimalkan manfaat program.
 - b. Evaluasi *Input*

Evaluasi *input* pada program teknologi tepat guna menunjukkan bahwa alokasi dan pengelolaan dana untuk pemberdayaan masyarakat perlu perhatian pada sumber daya alam yang memadai. Sumber daya manusia cukup, tetapi teknologi harus sesuai dengan kondisi lokal. Alokasi dana memerlukan perencanaan yang matang, transparansi, dan partisipasi aktif, dengan dana dari APBN dan APBD.
 - c. Evaluasi Proses

Evaluasi proses pada program pemberdayaan masyarakat dengan teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan SOP, memuaskan masyarakat, dan meningkatkan rasa aman serta kepercayaan. Masyarakat antusias berpartisipasi dan menemukan pelatihan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
 - d. Evaluasi Produk

Evaluasi *product* pada program pemberdayaan masyarakat dengan teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa implementasi telah meningkatkan kapasitas dan kemandirian lembaga kemasyarakatan, termasuk dalam aspek ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan berkelanjutan. Masyarakat merasakan dampak positif, seperti peningkatan kesejahteraan dan kemandirian, serta kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif.
2. Analisis implementasi program teknologi tepat guna menunjukkan faktor pendukung utama berupa analisis kebutuhan mendalam, keterlibatan masyarakat, penyesuaian program dengan kebutuhan lokal, serta dukungan pemerintah. Faktor Pendukung lainnya termasuk perencanaan dan distribusi sarana yang memadai serta kualitas infrastruktur. Sedangkan keterbatasan sumber daya dan akses teknologi, kurangnya pelatihan dan kolaborasi masyarakat menjadi faktor penghambat efektivitas program.

DAFTAR PUSTAKA

- Agenda Riset Nasional (ARN). (2010-2014). Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari stp.ristekdikti.go.id
- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar kebijakan publik*.
- Arikunto, S. (1993). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S., & Abdul Jabar, C. S. (2009). *Evaluasi program pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, S. (2000). *Pengantar studi penelitian kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Endang, M. (2011). *Evaluasi proses suatu program*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Faisal, S. (1982). *Metodologi penelitian pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Firman, T. (1997). Land conversion and urban development in the northern region of West Java, Indonesia. *Urban Studies*, 34(7), 1027-1046.
- Idris, A., & Irawan, B. (2017). Implementasi kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *Jurnal Administrative Reform*, 3(1), 114-126.
- Madaus, G. F., Scriven, M. S., & Stufflebeam, D. L. (1983). The CIPP model for program evaluation. In *Evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation* (pp. 117-141).
- Mardikanto, T., & Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Diterjemahkan oleh T. R. Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (1988). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
- Rafiki, F., Arlan, A. S. B., & Urahmah, N. (2024). Efektivitas program pemberdayaan dan pelatihan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Palampitan Hilir. *Al Iidara Balad*, 6(1), 130-136.
- Rahmiyati, N., Andayani, S., & Panjaitan, H. (2015). Model pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen*, 2(2), 48-62.

- Ratnawati, S., & Kurniawati, R. (2023). Evaluasi pelayanan program kartu identitas anak pada sistem layanan kependudukan Go Digital. *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 7(2), 14-27.
- Robbins, S. P. (1994). *Teori organisasi: Struktur, desain, dan aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Sanjaya, W. (2015). *Penelitian pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Slamet, Y. (1993). *Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soetomo. (2009). *Pembangunan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 59, 25–52.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan publik: Proses dan analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Wirawan. (2007). *Budaya dan iklim organisasi: Teori, aplikasi, dan penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.